

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA TEBING TINGGI
TAHUN ANGGARAN 2022**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Tebing Tinggi untuk tahun anggaran 2022 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup Kota Tebing Tinggi.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Tebing Tinggi, Februari 2023
Inspektur Kota Tebing Tinggi



**H. KAMLAN, S.H., M.M., CGCAE
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650603 198602 1 004**



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

TAHUN 2022



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Kota Tebing Tinggi ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun oleh Dinas Lingkungan Hidup sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi yang nantinya akan digunakan sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun 2022.

Laporan tahunan tentang realisasi kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Tebing Tinggi ini disusun berdasarkan realisasi program kerja yang dimulai awal tahun 2017 untuk menyajikan informasi yang objektif dalam upaya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pasal 21 dan 22 disebutkan bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disampaikan oleh Kepala OPD kepada Walikota paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Kami menyadari masih terdapat beberapa kekurangan dalam penyusunan laporan ini. Untuk itu, kami terbuka atas kritik dan saran yang membangun guna penyempurnaan lebih lanjut. Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Kota Tebing Tinggi ini berguna sebagai salah satu bahan penelitian atas realisasi kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2021 dan sebagai bahan penyusunan LKT Kota Tebing Tinggi Tahun 2021.

Tebing Tinggi, Februari 2023

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tebing Tinggi



Dr. H. MUHAMMAD HASBIE ASHSHIDDIQI, M.M., M.Si.

Pembina Tk.I

NIP. 19760731 200801 1 001

BAB I PENDAHULUAN

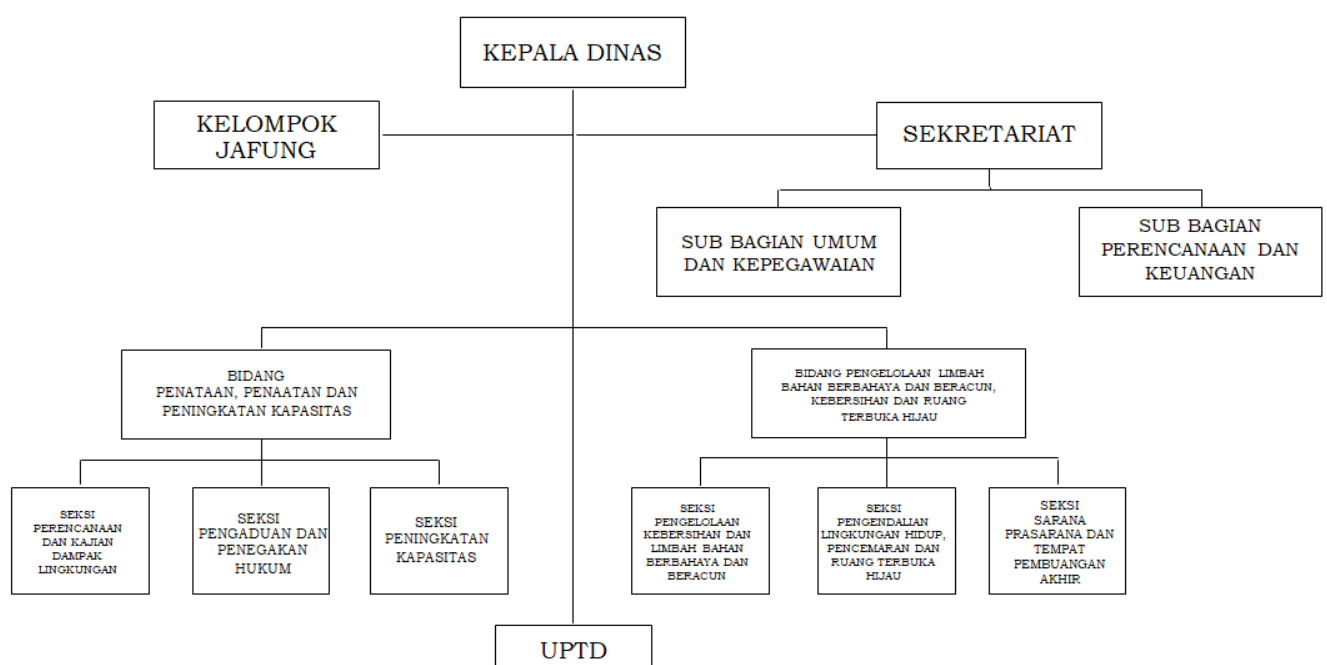
1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 71 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi Dinas Lingkungan Hidup Kota Tebing Tinggi menjalankan Urusan Wajib Lingkungan Hidup di Kota Tebing Tinggi. Berdasarkan Peraturan Walikota Tebing Tinggi No Nomor 71 Tahun 2021 tentang tugas, fungsi, tata kerja dan rincian tugas jabatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tebing Tinggi, Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang lingkungan hidup, kehutanan, dan kebersihan , dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretrais Daerah. Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang lingkungan hidup, kehutanan dan kebersihan,
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup,kehutanan dan kebersihan,
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup, kehutanan dan kebersihan,
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang lingkungan hidup, kehutanan dan kebersihan, dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Sesuai dengan Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 71 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi, adapun Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:



Keadaan Pegawai

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Tebing Tinggi sangat membutuhkan dukungan sumber daya organisasi. Daftar pegawai Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan tingkat pendidikannya per tanggal 19 Januari 2022 dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1 Daftar Pegawai Dinas Lingkungan Hidup

NO	NAMA	NIP	GOL	JABATAN
1	H.Muhammad Hasbie Ashshiddiqi, M.M., M.Si.	197607312008011001	IV/b	Kepala Dinas
2	Ahmad Fauzan, S.Farm., Apt.	197706022005021003	IV/a	Sekretaris
3	Fitryani Melfa Repina Simamora S.E.	198402142006042004	III/c	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
4	Dian Abadi Siregar, S.Stp., M.Si.	198301142001121002	III/d	Anallis Tata Usaha
5	Nazar Asmawi Lubis, S.Kom	199110082019031006	III/a	Analisis Sistem Informasi
6	Agnes Marida Tindaon, Se., M.Si.	198611122010012031	III/c	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
7	Meifiansyah, A.Md.	197905102010011006	III/a	Bendahara
8	Ribka Tiwa Naibaho, S.Si	199010102019032015	III/a	Analisis Lingkungan Hidup
9	Sasti Lestari, S.Kom.	199511212019032014	III/a	Analisis Sistem Informasi
BIDANG PENATAAN, PENTAATAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS				
10	Syahputra, S.T.	198209152005021002	III/d	Kabid Penataan, Penataan dan Peningkatan Kapasitas
11	Desi Erni D	1979121820031220	III/d	Kasi Perencanaan dan Kajian

	Pulungan, S.K.M.	03		Dampak Lingkungan
12	Ali Mukmin Ritonga, S.Si.	198601112010012024	III/a	Analisis Lingkungan Hidup
13	Imelda Saurtua. J. Sijabat, S.T.	199307312019032008	III/a	Penelaah Dampak Lingkungan
14	Egia Putri K Sembiring, S.T.	199503162019032011	III/a	Penelaah Dampak Lingkungan
15	Muhammad Jun, S.H.	197506082003121004	III/d	Kasi Pengaduan dan Penegakan Hukum
16	Madju T.Manulang, A.Md.	197105072010011004	III/a	Pengelola Dokumen Mengenai Analisis Dampak Lingkungan
17	Hilda Suryani Lubis, S.P.	197405181998032004	III/d	Kasi Peningkatan Kapasitas
18	Herlina Yanti Panjaitan, S.T.	197802022010012013	III/c	Penyuluh Lingkungan Hidup
19	Ike B Lestina Siregar, S.K.M	198811202019032003	III/a	Penyuluh Lingkungan Hidup
BIDANG PENGELOLAAN LIMBAH B3, KEBERSIHAN DAN RUANG TERBUKA HIJAU				
20	Hendra Wijaya, S.E.	196806211997031003	III/d	Kabid Pengelolaan Limbah B3, Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
21	Marsini N. Sembiring, S.Si.	198511122019032008	III/a	Analisis Lingkungan Hidup
22	Anggi Otari Sihite, S.T.	199410152019031007	III/a	Analisis Adaptasi Dampak Perubahan Iklim
23	Angelika Roria Sihombing, S.T.	199605172020122012	III/a	Analisis Pembangunan
24	Rajab	197209042008011003	II/d	Juru Pungut Retribusi
25	Haryono	197005122012122001	II/c	Juru Pungut Retribusi
26	Supriati	197306162008012003	II/b	Juru Pungut Retribusi

27	Dedi Mahyudi	197602102007011008	II/b	Pengelola Penataan Sampah
28	Sudir	197709122007011005	II/b	Teknisi Mesin
29	Sulastri	197209092008012001	II/a	Juru Pungut Retribusi
30	Jumiati	197707202009012002	I/d	Juru Pungut Retribusi
31	Misni	196509252012122001	I/c	Pramu Kebersihan
32	Iis Misdianto	198105012012122002	I/c	Pramu Kebersihan
33	Muslimah	196410112012122001	I/b	Pramu Kebersihan
34	Melva S. Hutasoit, S.K.M.	197605112008042001	III/c	Kasi Pengendalian Lingkungan Hidup Pencemaran dan Ruang Terbuka Hijau
35	Nurmaida Sari, S.T.	198801272010012005	III/c	Analisis Lingkungan Hidup
36	Boboy Andika Harahap, S.A.P	198812262010011003	III/b	Analisis Adaptasi Dampak Perubahan Iklim
37	Imelda Siahaan, S.Si	198601112010012024	III/a	Analisis Lingkungan Hidup
38	Muhammad Emir Aulia, S.Si.	198904172019031005	III/a	Analisis Sistem Mutu dan Lingkungan
39	Julkarnaen	196909012007011013	II/d	Pengelola Sarana & Prasarana Taman
40	Muhammad Fadli	197712062002121005	II/d	Pranata Taman
41	Irmawati Nasution	198008192009012001	II/c	Pranata Taman
42	Yopi Burnama Chairul	198111072009011001	II/c	Pengelola Sarana & Prasarana Taman
43	Poniran	1971070320070110	II/a	Pengelola Sarana &

		04		Prasarana Taman
44	Syafar Halomoan, S.T.	1969042819900310 08	III/d	Kasi Prasarana Prasarana dan Tempat Pembuangan Akhir
45	Moritz Thomsen Marbun, S.T.	1988022120201210 05	III/a	Analisis Pembangunan
46	Asrianto	19780701 200901 1002	II/d	Pengelola Penataan Sampah
47	Agus Haryadi Syahputra	1978070120090110 02	II/d	Pengadministrasi TPA
48	Suheriono	1983110720090110 03	II/c	Pengelola Penataan Sampah
49	Selamat Putra	1981120220080110 01	II/b	Pramu Kebersihan
50	Lilik Suriyanto	1985060520121210 02	II/a	Teknisi Mesin
51	Yudi Syahputra	1979052020090110 02	I/d	Pramu Kebersihan
52	Agus Ramlan Nasution	1966080820121210 02	I/c	Pramu Kebersihan
53	Suparman	1975051520121210 03	I/c	Pramu Kebersihan
54	Mhd Riduan	1982010320121210 03	I/c	Pramu Kebersihan

Tabel 2 Distribusi Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Berdasarkan Golongan/ Pangkat

No.	Golongan/ Pangkat	Jumlah Pegawai (orang)
1	IV/b	1
2	IV/a	1
3	III/d	7
4	III/c	5
5	III/b	1
6	III/a	15
7	II/d	5
8	II/c	4
9	II/b	4
10	II/a	3
11	I/b	1
12	I/d	2
13	I/c	5
J u m l a h		54

Keadaan Sarana dan Prasarana

Dinas Lingkungan Hidup merupakan salah satu unit kerja/lembaga teknis daerah yang merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah dalam bidang lingkungan hidup di pemerintahan Kota Tebing Tinggi berdasarkan Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 71 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi.

Adapun Sarana dan Prasarana yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 3 Sarana dan Prasarana Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021

Nama Barang	Jumlah
TANAH	3

ALAT BESAR	3
KOMPUTER	46
ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	0
ALAT KESELAMATAN KERJA	0
PERALATAN PROSES/PRODUKSI	2
ALAT ANGKUTAN	17
ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	29
ALAT PERTANIAN	12
ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	624
ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	8
ALAT LABORATORIUM	122
ALAT PERSENJATAAN	23
BANGUNAN GEDUNG	6
MONUMEN	0
TUGU TITIK KONTROL/PASTI	0
JALAN DAN JEMBATAN	1
BANGUNAN AIR	14
INSTALASI	11
JARINGAN	4
BAHAN PERPUSTAKAAN	20
BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA	1

1.3 Aspek Strategis serta Permasalahan Utama

Dalam menjalankan Tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Tebing Tinggi sesuai dengan Peraturan Walikota No Nomor 71 Tahun 2021 tentang tugas, fungsi, tata kerja dan rincian tugas jabatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tebing Tinggi adalah bertanggung jawab pada Urusan Wajib Lingkungan Hidup dengan melakukan pengawasan, pengelolaan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di Kota Tebing Tinggi. Beberapa masalah yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup dalam menangani urusan lingkungan hidup adalah sebagai berikut:

1. Laboratorium belum terakreditasinya lingkungan hidup;
2. Kurangnya pelatihan khusus peningkatan kompetensi di bidang lingkungan hidup;
3. Lalainya masyarakat memahami kebutuhannya sendiri terhadap lingkungan yang sehat sekarang dan masa yang akan datang;

4. Pelaku dunia usaha dan kegiatan yang air limbah dan emisi buangnya tidak memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan;
5. Pelaku dunia usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaporkan pengelolaan lingkungan industrinya secara berkala kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Tebing Tinggi;
6. Usaha dan/ atau kegiatan yang belum memiliki dokumen lingkungan.

1.4 Landasan Hukum

Adapun Landasan Hukum Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut:

1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Asas Pengelolaan Keuangan Negara adalah Akuntabilitas Berorientasi Hasil, Penerapan Anggaran Berbasis Prestasi Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Kewajiban melaporkan akuntabilitas Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SAKIP diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran berorientasi pada hasil;
6. Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi dan Implementasi SAKIP.

1.5 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Adapun sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun LKjIP/manfaat LKjIP, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup , Isu-isu

Strategis, Keadaan Pegawai, Sarana dan Prasarana, Keuangan serta Sistematika Laporan LKjIP.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, visi misi kepala daerah, tujuan dan sasaran perangkat daerah dan strategi, program dan kegiatan, perjanjian kinerja, rencana anggaran, target belanja OPD, serta alokasi anggaran per sasaran strategis. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Kepada Daerah.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi. Disajikan pula Inovasi yang telah dilakukan oleh Perangkat daerah. Inovasi dimaknai sebagai penemuan hal-hal baru atau proses kreatif terhadap sesuatu yang sudah ada maupun yang sudah ada sebelumnya. Inovasi dianggap mampu meningkatkan nilai tambah output kegiatan yang berkualitas.

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Perencanaan Strategis adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung Tujuan, Sasaran, dan Program yang realistis dan rencana masa depan yang diinginkan dan dicapai.

Pemerintah Kota Tebing Tinggi merumuskan Visi pembangunan Kota Tebing Tinggi Tahun 2017-2022 sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 8 Tahun 2017 adalah **“Menjadikan Kota Tebing Tinggi sebagai Kota Jasa dan Perdagangan yang Cerdas, Layak, Mandiri, dan Sejahtera dengan Sumber Daya Manusia yang Beriman dan Berkualitas”** yang mengandung makna mengenai kuatnya komitmen Walikota untuk merealisasikan kondisi ideal yang diharapkan dapat terwujud pada periode pemerintahan dan pembangunan 5 (lima) tahun mendatang. Sebagai upaya untuk mewujudkan visi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 4 (empat) misi, yaitu:

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Kota Tebing Tinggi yang baik;
2. Mewujudkan Tebing Tinggi Sebagai Pusat Kegiatan Wilayah dan Perdagangan;
3. Mewujudkan Kota Tebing Tinggi Sebagai Kota Jasa;
4. Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Perkotaan.

Visi dan Misi Kepala Daerah

Berdasarkan Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Kota Tebing Tinggi tahun 2017-2022 dan mengacu pada tugas dan fungsinya, maka Dinas Lingkungan Hidup Kota Tebing Tinggi akan mendukung terlaksananya Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Kota Tebing Tinggi terutama di misi ke 4 **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Kota Tebing Tinggi yang baik dan Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Perkotaan”**.

2.1.3 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Berdasarkan visi dan misi dari Walikota Tebing Tinggi, tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup yang tercantum dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

Tujuan:

1. Perilaku Masyarakat Berwawasan Lingkungan.

Sasaran:

1. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

Dalam mewujudkan visi dan misi Wali Kota Tebing Tinggi yang diemban Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup mengikuti kebijakan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup yang menjadikan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebagai Indikator Kinerja Utama, dimana Indeks Kualitas Lingkungan Hidup menggambarkan kualitas lingkungan hidup Kota Tebing Tinggi yang difokuskan pada media lingkungan air, udara dan tutupan lahan.

Tabel 1. Tujuan, Sasaran dan Indikator dan Target 2018-2022

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun				
					2018	2019	2020	2021	2022
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Perilaku Masyarakat Berwawasan Lingkungan	Meningkatnya kesadaran masyarakat menjaga lingkungan	1.1 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	69	69	70	70	56,77

2.2 Rencana Kinerja Tahun 2022

Rencana Kinerja merupakan target kinerja Dinas Lingkungan Hidup yang harus dicapai, dimana Dinas Lingkungan Hidup menetapkan Rencana Kinerja mengacu pada Suplemen RPJMD Tahun 2021.

Merujuk pada Tabel diatas, dapat dijabarkan rencana Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022 sebagai berikut:

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Perilaku Masyarakat Berwawasan Lingkungan	Meningkatnya kesadaran masyarakat menjaga lingkungan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	56,77

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun Perjanjian Kinerja Eselon II Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Tabel Perjanjian Kinerja

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)
1	Perilaku Masyarakat Berwawasan Lingkungan/	Meningkatnya kesadaran masyarakat menjaga lingkungan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	56,77

Tabel 3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan TA. 2022

Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup sesuai Kepmendagri Nomor: 050/3708/2021 adalah sebagai berikut:

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	ANGGARAN
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Bulan	3	5.542.450.310
Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bulan	3	133.121.100

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Dinas Lingkungan Hidup Yang Relevan Dengan Kebutuhan Daerah Dan Sinkron Dengan Provinsi Maupun Pusat	Dokumen	1	78.747.400
Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja Dan Realisasi Kinerja Skpd	Bulan	1	54.373.700
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Dinas Lingkungan Hidup Yang Relevan Dengan Kebutuhan Daerah Dan Sinkron Dengan Provinsi Maupun Pusat	BULAN	3	4.296.913.800
Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn	Tersedianya Gaji Dan Tunjangan Asn	DOKUMEN	3	4.233.972.000
Koordinasi Dan Pelaksanaan Akuntansi Skpd	Tersusunnya Dokumen Terkait Koordinasi Dan Akuntansi Skpd	DOKUMEN	6	11.429.200
Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan An/Semesteran Skpd	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran Skpd	BULAN	1	51.512.600
Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Premi Asuransi Gedung Kantor Dan Kendaraan Dinas	BULAN	3	24.972.200
Pengamanan Barang Milik Daerah Skpd	Penyediaan Premi Asuransi Gedung Kantor Dan Kendaraan Dinas	DOKUMEN	3	24.972.200
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Dinas Lingkungan Hidup	DOKUMEN	3	267.335.300
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	BULAN	3	16.675.400
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	BULAN	3	36.639.000
Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak Dan Penggandaan	BULAN	3	12.788.900

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BULAN	3	201.232.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah	Tersedianya Barang Milik Daerah	BULAN	0	277.786.035
Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	BULAN	0	94.053.700
Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	BULAN	0	183.732.335
Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Daerah	UNIT	3	246.349.235
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	UNIT	3	2.799.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Dan Listrik	UNIT	3	131.777.035
Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor	Tersedianya Jsa Pelayanan Umum Kantor	BULAN	3	111.773.200
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penanganan Sampah Dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Dan Pemrosesan Akhir Sampah Di Tpa/Tpst/Spa Kabupaten Kota	BULAN	0	295.972.640
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	BULAN	3	105.360.000
Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan Dan Mesin Lainnya	BULAN	3	45.340.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung kantor	%	100	145.272.640

Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Tersedianya Dokumen Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Rpplh)	BULAN	0	189.694.213
Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Rpplh) Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Rpplh)	BULAN	0	189.694.213
Penyusunan Dan Penetapan Rpplh Kabupaten/Kota	Pedoman Penyusunan Ikplhd	BULAN	0	171.412.200
Pengendalian Pelaksanaan Rpplh Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Rpplh)	DOKUMEN	0	18.282.013
Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	Perusahaan Yang Taat Dalam Pelaksanaan Izin Lingkungan	DOKUMEN	14	207.340.280
Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Izin Lingkungan Dan Izin Pplh Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Izin Pplh Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	PERUSAHAAN	7	207.340.280
Pengawasan Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Izin Lingkungan Hidup, Izin Pplh Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Pengawasan Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Izin Lingkungan Hidup, Izin Pplh Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Kota Tebing Tinggi	PERUSAHAAN	7	179.427.580
Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Dan Kewajiban Izin Lingkungan Dan/Atau Izin Pplh	Dokumen Yang Taat /Dokumen Izin Yang Dikeluarkan	PERUSAHAAN	0	27.912.700

Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Terselenggaranya Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Kepada Masyarakat	PERUSAHAAN	0	171.765.900
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup kepada Masyarakat	PERUSAHAAN	0	171.765.900
Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Tercapainya Penghargaan Bagi Kota Tebing Tinggi, Penghargaan Stand Pameran Terbaik Pada Tingkat Provinsi Dan Terlaksananya Perayaan Hari Lingkungan Hidup Sedunia	DOKUMEN	0	171.765.900
Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Terselenggaranya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	EVENT	0	28.013.200
Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	KEGIATAN	0	28.013.200
Penilaian Kinerja Masyarakat/Lemba Ga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Terselenggaranya Penilaian Sekolah Adiwiyata Dan Lomba Pendidikan Lingkungan Hidup Tingkat Kota Tebing Tinggi	KEGIATAN	0	28.013.200
Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Peserta Yang Mengikuti Sosialisasi	KEGIATAN	0	10.557.080.858
Pengelolaan Sampah	Persentase Peserta Yang Mengikuti Sosialisasi	KEGIATAN	0	10.557.080.858
Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan	Persentase Peserta Yang Mengikuti Sosialisasi	Persen	0	42.145.600
Penanganan Sampah Dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, Dan	Tersedianya Penanganan Sampah Dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Dan Pemrosesan Akhir Sampah Di Tpa/ Tpst/ Spa Kabupaten	Tahun	0	6.994.888.464

Pemrosesan Sampah Tpa/Tpst/Spa Kabupaten/Kota	Akhir Di	Kota			
Penyusunan Kebijakan Dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota		Dokumen Penyusunan Kebijakan Dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kota Tebing Tinggi	Dokumen	0	2.200
Koordinasi Dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pengelolaan Persampahan		Jumlah Sarana Dan Prasarana Pengelolaan Persampahan Yang Berkualitas Dan Terdistribusi Secara Merata Keseluruhan Wilayah Kota	Tahun	0	3.520.044.594
Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup		Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara Dan Indeks Kualitas Lahan	Dokumen	0	383.214.000
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara Dan Indeks Kualitas Lahan	Angka	0	383.214.000
Koordinasi, Sinkronisasi Dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, Dan Laut		Dokumen Pengujian Dan Pemeriksaan Limbah Cair, Air Sungai, Emisi Udara, Udara Ambien	Dokumen	0	254.802.300
Koordinasi, Sinkronisasi Dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi Dan Adaptasi Perubahan Iklim		Inventarisasi Gas Rumah Kaca (Igrk)	Laporan	0	17.392.000
Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		Jumlah Parameter Pengujian Laboratorium Pada Dinas Lingkungan Hidup	Laporan	0	111.019.700

Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Terlaksananya Ruang Terbuka Hijau (Rth)	Hektare	192,9	5.014.938.144
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Luas Rth Yang Dikelola	Laporan	1	5.014.938.144
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Rth)	Terlaksananya Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau	Hektare	192,88	5.014.938.144
Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Berbahaya Dan Beracun	Jumlah Pelaku Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Melakukan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun	Dokumen	0	0
Pengumpulan Limbah B3 Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Melakukan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun	Laporan	0	0
Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 Dengan Pemerintah Provinsi Dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan Dan/Atau Penimbunan	Jumlah Pelaku Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Menghasilkan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3)	Bulan / Laporan	0	

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup kota Tebing Tinggi dimulai dengan pengembangan indikator kinerja dan metode pengukuran yang berpedoman pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Tebing Tinggi 2017-2022. Pengukuran kinerja ditekankan pada penetapan target sasaran tahunan dan pencapaiannya, dengan cara mengembangkan pengukuran terhadap indikator kinerja output yang dikaitkan dengan pencapaian sasaran.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai bahan evaluasi untuk mengukur kinerja organisasi, di mana hasil pengukuran kinerja organisasi dimaksud lebih lanjut untuk mengidentifikasi permasalahan yang menghambat peningkatan kinerja, memberikan solusi pemecahan masalah, dan bahan penyempurnaan pilihan-pilihan dan kebijakan strategis tahun berikutnya.

Sesuai dengan **Surat Dirjen PPKL Kemen LHK Nomor : S-318/PPKL/SET/REN.0/12/2020 4 Desember 2020 tentang Metode Perhitungan IKLH 2020-2024 dan Permen LHK Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**, sejak tahun 2021 Dinas Lingkungan Hidup harus menggunakan metode perhitungan baru dan telah ditetapkan target IKLH Kota Tebing Tinggi tahun 2022 sebesar 56,77. Maka jika dibandingkan dengan capaian Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022 sebesar 61,76 efisiensi Dinas Lingkungan Hidup terhadap indikator capaian sangat baik.

Tabel 4 Capaian Indikator Kinerja Utama

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	Perilaku Masyarakat Berwawasan Lingkungan/	Meningkatnya kesadaran masyarakat menjaga lingkungan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	56,77	61,76	108,79	Sangat baik	Dinas Lingkungan Hidup

Target IKU tahun 2021 Perjanjian Kinerja telah ditetapkan di awal tahun 2021 dimana target yang ditetapkan masih menggunakan metode lama. Dan target tersebut telah diperbaharui di tahun 2022 dalam Perubahan atas Keputusan Walikota Nomor 060/1167 Tahun 2021 tentang Suplemen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Tebing

Tinggi Tahun 2021-2022 sesuai dengan Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup. Dan bisa dilihat dalam table dibawah.

Tabel 5 Perbandingan Capaian Kinerja

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	IndikatorK inerja	2021			2022		
					Target	Realisa si	% Capai an	Target	Realisa si	% Capai an
1	Perilaku Masyarakat Berwawasan Lingkungan/	Meningkatnya kesadaran masyarakat menjaga lingkungan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	76,22	60,32	86,17	56,77	61,76	108,79

Sesuai dengan Perubahan atas Keputusan Walikota Nomor 060/1167 Tahun 2021 tentang Suplemen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun 2021-2022 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup menjadi salah satu IKU Wali Kota, dimana targetnya dapat dilihat dala tabel berikut:

Tabel 6 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis Dibandingkan dengan RPJMD

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	IndikatorKinerja	Capaian 2022	Target Akhir RPJMD 2022	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6	5	6 = $4/5 * 100$
	Perilaku Masyarakat Berwawasan Lingkungan/	Meningkatnya kesadaran masyarakat menjaga lingkungan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	61,76	56,77	108,79

Untuk menjawab Misi RPJMN 2020-2024 No.8 yaitu Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Agenda Pembangunan Presiden no. 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup melalui **Surat Dirjen PPKL Kemen LHK Nomor : S-318/PPKL/SET/REN.0/12/2020 4 Desember 2020 tentang Metode Perhitungan IKLH 2020-2024 dan Permen LHK Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, (terlampir)** telah menyamakan metode dan menetapkan target tiap kabupaten/kota yang harus dicapai tiap tahunnya, dimana Kota Tebing Tinggi telah ditetapkan untuk mencapai IKLH sesuai table berikut:

Tabel 7 Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota Lain

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2022	Standar Nasional	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6/7*100
1	Perilaku Masyarakat Berwawasan Lingkungan	Meningkatnya kesadaran masyarakat menjaga lingkungan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	61,76	56,77	108,79%

Dimana sumber data pencapaian nilai IKLH diperoleh dari perhitungan IKLH sesuai dengan rumus yang ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan perhitungannya dapat dilihat sebagai berikut:

a. IKA Kota Tebing Tinggi

Mutu Air	Jumlah Pemantauan yang Memenuhi Mutu Air	Persentase Pemenuhan Mutu Air	Bobot Nilai Indeks	Nilai Indeks per Mutu Air
Memenuhi	13	72 %	70	50,56
Ringan	4	22 %	50	11,11
Sedang	1	6 %	30	1,67
Berat	0	0 %	10	0
Nilai IKA Kota Tebing Tinggi				63,33

b. IKU Kota Tebing Tinggi

$$\begin{aligned}
 I_{EU} &= \frac{\text{Indeks NO}_2 + \text{Indeks SO}_2}{2} \\
 &= \frac{0,4318125 + 0,43390625}{2} \\
 &= \frac{0,86571875}{2} \\
 &= \mathbf{0,432859375}
 \end{aligned}$$

$$IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,9} (I_{EU} - 0,1) \right)$$

$$IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,9} (0,432859375 - 0,1) \right)$$

$$IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,9} (0,332859375) \right)$$

$$IKU = 100 - (18,4921875)$$

$$IKU = 81,5078125$$

$$IKU \approx 81,51$$

c. Indeks Kualitas Lahan (IKL)

$$IKL = 100 - \left((84,3 - (TL \times 100)) \times \frac{50}{54,3} \right)$$

$$IKL = 100 - \left((84,3 - (0,0017797523715658 \times 100)) \times \frac{50}{54,3} \right)$$

$$IKL = 100 - \left((84,3 - (0,17797523715658)) \times \frac{50}{54,3} \right)$$

$$IKL = 100 - \left((84,12202476284342) \times \frac{50}{54,3} \right)$$

$$IKL = 100 - 77,46042795841935$$

$$IKL = 22,53957204158065$$

$$IKL \approx 22,54$$

$$\begin{aligned} \text{IKLH Kota} &= (0,376 \times \text{IKA}) + (0,405 \times \text{IKU}) + (0,219 \times \text{IKL}) \\ &= (0,376 \times 63,33) + (0,405 \times 81,51) + (0,219 \times 22,54) \\ &= 23,81 + 33,01 + 4,94 \\ &= \mathbf{61,76} \end{aligned}$$

Dan dapat dilihat lebih rinci dalam **lampiran 2**.

Adapun yang menjadi faktor Keberhasilan Dinas Lingkungan Hidup dalam mencapai Target IKLH ditunjukkan dalam table berikut:

Tabel 8 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan dan Solusi

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Perilaku Masyarakat Berwawasan Lingkungan	Meningkatnya kesadaran masyarakat menjaga lingkungan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	56,77	61,76	108,79	Sesuai dengan Permen LHK Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup , capaian IKLH Dinas Lingkungan	Terus melakukan edukasi mengenai lingkungan hidup dan pengawasan ketat.

									Hidup sangat baik, hal ini disebabkan Kesadaran masyarakat menjaga lingkungan yang terus meningkat disebabkan pengawasan serta edukasi lingkungan hidup yang terus dilakukan
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Adapun Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dapat dilihat dalam table berikut:

Pencapaian IKLH Dinas Lingkungan Hidup di tahun 2022 naik sebesar 1,44% dibanding tahun lalu yang disebabkan:

1. Melakukan pengendalian pencemaran air sungai, Salah satu nya membuat IPAL komunal dipemukiman yg dekat bantaran sungai sehingga dapat mengurangi pencemaran air sungai akibat limbah domestic
2. Melakukan pengendalian pencemaran udara salah satu nya dengan melakukan penanaman pohon, pemantauan emisi sumber bergerak dan tidak bergerak
3. Melakukan pemeliharaan ruang terbuka hijau dan melakukan penanaman pohon, menambah perluasan/penutupan lahan
4. Kesadaran masyarakat menjaga lingkungan yang terus meningkat disebabkan pengawasan serta edukasi lingkungan hidup yang terus dilakukan.

Tabel 9 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	% Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang
1	Perilaku Masyarakat Berwawasan Lingkungan/ Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Bulan	12	100	Menunjang
			Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bulan	12	100	Menunjang
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Dinas Lingkungan Hidup Yang Relevan Dengan Kebutuhan Daerah Dan Sinkron Dengan Provinsi Maupun Pusat	Dokumen	6	100	Menunjang
			Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja Dan Realisasi Kinerja Skpd	Bulan	6	100	Menunjang
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Dinas Lingkungan Hidup Yang Relevan Dengan Kebutuhan Daerah Dan Sinkron Dengan Provinsi Maupun Pusat	BULAN	12	100	Menunjang
			Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn	Tersedianya Gaji Dan Tunjangan Asn	BULAN	12	100	Menunjang

			Koordinasi Dan Pelaksanaan Akuntansi Skpd	Tersusunnya Dokumen Terkait Koordinasi Dan Akuntansi Skpd	DOKUMEN	24	100	Menunjang
			Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan An/Semesteran Skpd	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran Skpd	BULAN	4	100	Menunjang
			Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Premi Asuransi Gedung Kantor Dan Kendaraan Dinas	BULAN	12	100	Menunjang
			Pengamanan Barang Milik Daerah Skpd	Penyediaan Premi Asuransi Gedung Kantor Dan Kendaraan Dinas	DOKUMEN	12	100	Menunjang
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Admnistrasi Umum Dinas Lingkungan Hidup	BULAN	12	100	Menunjang
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	BULAN	12	100	Menunjang
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	BULAN	12	100	Menunjang
			Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan Dan Penggandaan	BULAN	12	100	Menunjang
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BULAN	12	100	Menunjang
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Tersedianya Barang Milik Daerah	UNIT	12	100	Menunjang
			Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	UNIT	6	100	Menunjang
			Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	UNIT	6	100	Menunjang

			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	BULAN	12	100	Menunjang
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	BULAN	12	100	Menunjang
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Dan Listrik	BULAN	12	100	Menunjang
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	BULAN	12	100	Menunjang
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penanganan Sampah Dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Dan Pemrosesan Akhir Sampah Di Tpa/Tpst/Spa Kabupaten Kota	BU LAN	12	100	Menunjang
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	BULAN	12	100	Menunjang
			Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan Dan Mesin Lainnya	BULAN	12	100	Menunjang
			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung kantor	%	100	100	Menunjang
			Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Tersedianya Dokumen Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Rpplh)	DOKUMEN	1	100	Menunjang
			Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Rpplh) Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Rpplh)	DOKUMEN	2	100	Menunjang

			Penyusunan Dan Penetapan Rpplh Kabupaten/Kota	Pedoman Penyusunan Ikplhd	DOKUMEN	2	100	Menunjang
			Pengendalian Pelaksanaan Rpplh Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Rpplh)	DOKUMEN	1	100	Menunjang
			Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	Perusahaan Yang Taat Dalam Pelaksanaan Izin Lingkungan	PERUSAHAAN	50	100	Menunjang
			Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Izin Lingkungan Dan Izin Pplh Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Izin Pplh Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	PERUSAHAAN	35	100	Menunjang
			Pengawasan Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Izin Lingkungan Hidup, Izin Pplh Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Pengawasan Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Izin Lingkungan Hidup, Izin Pplh Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Kota Tebing Tinggi	PERUSAHAAN	20	100	Menunjang
			Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Dan Kewajiban Izin Lingkungan Dan/Atau Izin Pplh	Dokumen Yang Taat /Dokumen Izin Yang Dikeluarkan	Dok	1	100	Menunjang

			Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Terselenggaranya Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Kepada Masyarakat	EVEN T	5	100	Menunjang
			Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup kepada Masyarakat	EVEN T	5	100	Menunjang
			Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Tercapainya Penghargaan Bagi Kota Tebing Tinggi, Penghargaan Stand Pameran Terbaik Pada Tingkat Provinsi Dan Terlaksananya Perayaan Hari Lingkungan Hidup Sedunia	EVEN T	3	100	Menunjang
			Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Terselenggaranya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	EVEN T	2	100	Menunjang
			Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	KEGIATAN	2	100	Menunjang
			Penilaian Kinerja Masyarakat/Lemba Ga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Terselenggaranya Penilaian Sekolah Adiwiyata Dan Lomba Pendidikan Lingkungan Hidup Tingkat Kota Tebing Tinggi	KEGIATAN	2	100	Menunjang

			Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air, Kualitas Dan Kualitas Udara Dan Indeks Kualitas Lahan	Dokumen	3	100	Menunjang
			Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Indeks Kualitas Air, Kualitas Dan Kualitas Udara Dan Indeks Kualitas Lahan	Dokumen	3	100	Menunjang
			Koordinasi, Sinkronisasi Dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, Dan Laut	Dokumen Pengujian Dan Pemeriksaan Limbah Cair, Air Sungai, Emisi Udara, Ambien	Dokumen	1	100	Menunjang
			Koordinasi, Sinkronisasi Dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi Dan Adaptasi Perubahan Iklim	Inventarisasi Gas Rumah Kaca (Igrk)	Laporan	1	100	Menunjang
			Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Parameter Pengujian Laboratorium Pada Dinas Lingkungan Hidup	Laporan	1	100	Menunjang
			Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Terlaksananya Ruang Terbuka Hijau (Rth)	Hektare	192,9	100	Menunjang
			Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Luas Rth Yang Dikelola	Laporan	1	100	Menunjang
			Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Rth)	Terlaksananya Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau	Hektare	192,88	100	Menunjang

			Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun	Jumlah Pelaku Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Melakukan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun	Doku men	0	0	Menunjan g
			Pengumpulan Limbah B3 Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Ko ta	Jumlah Pelaku Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Melakukan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun	Lapor an	0	0	Menunjan g
			Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 Dengan Pemerintah Provinsi Dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan Dan/Atau Penimbunan	Jumlah Pelaku Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Menghasilkan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3)	Bulan / Lapor an	0		Menunjan g
			Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Peserta Yang Mengikuti Sosialisasi	bulan	12	12	Menunjan g
			Pengelolaan Sampah	Persentase Peserta Yang Mengikuti Sosialisasi	bulan	12	12	Menunjan g
			Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan	Persentase Peserta Yang Mengikuti Sosialisasi	Perse n	100	100	Menunjan g
			Penanganan Sampah Dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan,D	Tersedianya Penanganan Sampah Dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Dan Pemrosesan	Tahu n	1	1	Menunjan g

			an Pemrosesan Akhir Sampah Di Tpa/Tpst/Spa Kabupaten/Kota	Akhir Sampah Di Tpa/Tpst/Spa Kabupaten Kota				
			Penyusunan Kebijakan Dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Dokumen Penyusunan Kebijakan Dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kota Tebing Tinggi	Dokumen	0		Menunjang
			Koordinasi Dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pengelolaan Persampahan Jumlah Sarana Dan Prasarana Pengelolaan Persampahan Yang Berkualitas Dan Terdistribusi Secara Merata Keseluruhan Wilayah Kota	Koordinasi Dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pengelolaan Persampahan Jumlah Sarana Dan Prasarana Pengelolaan Persampahan Yang Berkualitas Dan Terdistribusi Secara Merata Keseluruhan Wilayah Kota	Tahun	1	1	Menunjang

3.2 Realisasi Anggaran

Anggaran merupakan alat dan arah yang sangat besar pengaruhnya untuk mencapai indikator kinerja, adapun capaian anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan adalah sebagai berikut:

Tabel 10 Capaian Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

BIDANG/SUB UNIT/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TOTAL DANA (Rp)	TOTAL DANA PAPBD 2022 (Rp)	REALISASI DANA YANG SUDAH DILAKSANAKAN (Rp)	% CAPAIAN
2	3	4	5	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4.880.596.621	5.542.450.310	5.258.037.055	94,87
Perencanaan, Pengangara, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	133.121.100	133.121.100	132.634.600	99,63
Penyusunan Dokumen perencanaan perangkat daerah	78.747.400	78.747.400	78.266.200	99,39
Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	54.373.700	54.373.700	54.368.400	99,99
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.051.986.621	4.296.913.800	4.115.017.925	95,77
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.000.186.821	4.233.972.000	4.054.606.625	95,76
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	9.629.200	11.429.200	10.886.900	95,26
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	42.170.600	51.512.600	49.524.400	96,14
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	24.972.200	24.972.200	0	0,00
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	24.972.200	24.972.200	0	0,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	182.509.100	267.335.300	265.146.851	99,18
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.675.400	16.675.400	16.655.400	99,88

Penyediaan Bahan Logistik Kantor	34.030.800	36.639.000	35.584.900	97,12
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.788.900	12.788.900	12.788.700	100,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	119.014.000	201.232.000	200.117.851	99,45
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	86.757.800	277.786.035	265.298.000	95,50
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39.017.800	94.053.700	89.942.000	95,63
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	47.740.000	183.732.335	175.356.000	95,44
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	250.549.200	246.349.235	193.653.893	78,61
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.799.000	2.799.000	2.790.000	99,68
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	135.977.000	131.777.035	95.338.053	72,35
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	111.773.200	111.773.200	95.525.840	85,46
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	150.700.000	295.972.640	286.285.786	96,73
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	105.360.000	105.360.000	99.627.786	94,56
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45.340.000	45.340.000	41.660.000	91,88

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	-	145.272.640	144.998.000	99,81
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	247.120.200	189.694.213	186.300.200	98,21
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	247.120.200	189.694.213	186.300.200	98,21
Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	21.998.000	18.282.013	16.938.200	92,65
Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	225.122.200	171.412.200	169.362.000	98,80
Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	461.406.800	383.214.000	355.078.080	92,66
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	461.406.800	383.214.000	355.078.080	92,66
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	313.332.300	254.802.300	231.901.100	91,01
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	17.392.000	17.392.000	14.791.100	85,05
Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	130.682.500	111.019.700	108.385.880	97,63
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	3.982.429.900	5.014.938.144	4.693.791.980	93,60

Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	3.982.429.900	5.014.938.144	4.693.791.980	93,60
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	3.982.429.900	5.014.938.144	4.693.791.980	93,60
Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun	13.246.900	0	0	-
Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	13.246.900	0	0	-
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	13.246.900	0	0	-
Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	207.340.280	207.340.280	148.839.860	71,79
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	207.340.280	207.340.280	148.839.860	71,79
Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	179.427.580	179.427.580	123.540.560	68,85
Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	27.912.700	27.912.700	25.299.300	90,64
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	111.765.900	171.765.900	83.234.440	48,46

Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	111.765.900	171.765.900	83.234.440	48,46
Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	111.765.900	171.765.900	83.234.440	48,46
Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	150.004.900	28.013.200	17.708.200	63,21
Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	150.004.900	28.013.200	17.708.200	63,21
Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	150.004.900	28.013.200	17.708.200	63,21
Program Pengelolaan Persampahan	8.845.719.144	10.557.080.858	10.220.551.721	96,81
Pengelolaan Sampah	8.845.719.144	10.557.080.858	10.220.551.721	96,81
Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	6.290.703.764	6.994.888.464	6.948.919.750	99,34
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	2.212.869.780	3.520.044.594	3.241.288.571	92,08
Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	300.000.000	2.200	0	0,00

Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan	42.145.600	42.145.600	30.343.400	72,00
Total	18.899.630.645	22.094.496.905	20.963.541.536	94,88

3.3. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi adalah pemanfaatan sumber daya secara minimum guna pencapaian hasil yang optimum. Efisiensi dapat menjadi ukuran tingkat pemanfaatan sumber daya dalam suatu proses. Adapun tingkat efisiensi penggunaan sumber daya Dinas Lingkungan Hidup dapat dilihat dalam table berikut:

Tabel 11. Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
				Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
1	Perilaku Masyarakat Berwawasan Lingkungan/	Meningkatnya kesadaran masyarakat menjaga lingkungan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	56,77	61,76	108,79	22.094.496.905	20.963.541.536	94,88	12,78

Sejalan dengan tingkat efisiensi kinerja dan anggaran, berikut dapat dilihat tingkat efisiensi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam table berikut:

Tabel 12. Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

BIDANG/SUB UNIT/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Effisiensi
	Target	Realisasi	% capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
2				4	5		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	12	12	100	5.542.450.310	5.258.037.055	94,87	5,131544
Perencanaan, Pengang gara, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	12	12	100	133.121.100	132.634.600	99,63	0,365457
Penyusunan Dokumen perencanaan perangkat daerah	6	6	100	78.747.400	78.266.200	99,39	0,611068
Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6	6	100	54.373.700	54.368.400	99,99	0,009747
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12	12	100	4.296.913.800	4.115.017.925	95,77	4,233175
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12	12	100	4.233.972.000	4.054.606.625	95,76	4,236338
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	24	24	100	11.429.200	10.886.900	95,26	4,744864

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	4	4	100	51.512.600	49.524.400	96,14	3,859638
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12	12	100	24.972.200	0	0,00	100
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12	12	100	24.972.200	0	0,00	100
Administrasi Umum Perangkat Daerah	12	12	100	267.335.300	265.146.851	99,18	0,818616
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	12	100	16.675.400	16.655.400	99,88	0,119937
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12	12	100	36.639.000	35.584.900	97,12	2,876989
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12	12	100	12.788.900	12.788.700	100,00	0,001564
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	100	201.232.000	200.117.851	99,45	0,553664
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	12	12	100	277.786.035	265.298.000	95,50	4,495559
Pengandaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6	6	100	94.053.700	89.942.000	95,63	4,371652
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6	6	100	183.732.335	175.356.000	95,44	4,558988
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	12	100	246.349.235	193.653.893	78,61	21,3905
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	100	2.799.000	2.790.000	99,68	0,321543

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	12	100	131.777.035	95.338.053	72,35	27,652
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	12	100	111.773.200	95.525.840	85,46	14,53601
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	12	100	295.972.640	286.285.786	96,73	3,272888
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12	12	100	105.360.000	99.627.786	94,56	5,440598
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12	12	100	45.340.000	41.660.000	91,88	8,116453
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	100	100	100	145.272.640	144.998.000	99,81	0,189051
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	1	1	100	189.694.213	186.300.200	98,21	1,789202
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	2	2	100	189.694.213	186.300.200	98,21	1,789202
Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	2	2	100	18.282.013	16.938.200	92,65	7,350465
Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	1	1	100	171.412.200	169.362.000	98,80	1,196064
Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan	50	50	100	207.340.280	148.839.860	71,79	28,21469

Lingkungan Hidup (PPLH)							
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	35	35	100	207.340.280	148.839.860	71,79	28,21469
Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	20	20	100	179.427.580	123.540.560	68,85	31,1474
Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	1	1	100	27.912.700	25.299.300	90,64	9,362763
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	5	5	100	171.765.900	83.234.440	48,46	51,54193
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5	5	100	171.765.900	83.234.440	48,46	51,54193
Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	3	3	100	171.765.900	83.234.440	48,46	51,54193
Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	2	2	100	28.013.200	17.708.200	63,21	36,78623
Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2	2	100	28.013.200	17.708.200	63,21	36,78623
Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	2	2	100	28.013.200	17.708.200	63,21	36,78623

Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	3	3	100	383.214.000	355.078.080	92,66	7,342091
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	3	3	100	383.214.000	355.078.080	92,66	7,342091
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	1	1	100	254.802.300	231.901.100	91,01	8,987831
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	1	1	100	17.392.000	14.791.100	85,05	14,95458
Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	1	1	100	111.019.700	108.385.880	97,63	2,37239
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	192,9	192,9	100	5.014.938.144	4.693.791.980	93,60	6,403791
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	1	1	100	5.014.938.144	4.693.791.980	93,60	6,403791
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	192,88	192,88	100	5.014.938.144	4.693.791.980	93,60	6,403791
Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun	0	0	100	-	-	0	0
Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	0	0	100	-	-	0	0

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	0	0	100	-	0	0	0
Program Pengelolaan Persampahan	12	12	100	10.557.080.858	10.220.551.721	96,81	3,18771
Pengelolaan Sampah	12	12	100	10.557.080.858	10.220.551.721	96,81	3,18771
Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	100	100	100	6.994.888.464	6.948.919.750	99,34	0,657176
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	1	1	100	3.520.044.594	3.241.288.571	92,08	7,919105
Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	0	0	100	2.200	0	0,00	0
Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan	1	1	100	42.145.600	30.343.400	72,00	28,0034

BAB IV PENUTUP

Dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, pelaporan LKT merupakan salah satu instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategis, maupun langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi Pemerintah dalam sistem akuntabilitas kinerja pemerintah.

Penyusunan LKT ini diharapkan dapat menunjukkan sinkronisasi antara rencana dengan realisasi serta pencapaian hasil kinerja yang telah dilaksanakan sepanjang tahun berjalan serta menjamin adanya kesinambungan program kerja di tahun mendatang guna peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat di bidang lingkungan hidup dari tahun ke tahun. Berdasarkan realisasi anggaran dan capaian kinerja atas indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan di awal tahun anggaran pada Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022, kinerja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2022 dapat dikategorikan **Baik dan Berhasil**.

Tahun Anggaran 2022 merupakan tahun awal pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Tebing Tinggi Tahun 2017-2022. Mengawali awal tahun perencanaan lima tahunan dengan kinerja yang baik dan berhasil, Dinas Lingkungan Hidup Kota Tebing Tinggi akan senantiasa melakukan perbaikan dan pembenahan dari tahun ke tahun agar seluruh program dan kegiatan yang direncanakan terkait urusan lingkungan hidup dapat direalisasikan dan mampu mengakomodasi seluruh permasalahan mengenai lingkungan hidup yang ada di Kota Tebing Tinggi demi terwujudnya Kota Tebing Tinggi yang bersih, sehat, dan bebas pencemaran.

Tebing Tinggi, Februari 2023

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tebing Tinggi



Dr. H. MUHAMMAD HASBIE ASHSHIDDIQI, M.M., M.Si.

Pembina Tk.I

NIP. 19760731 200801 1 001